

Filsafat Positivisme Dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Mengatasi Mal Administrasi Publik

M Hidayat Panuntun Muslim¹, Azmi Fitriisia², Ofianto³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: panuntunmuslim@gmail.com¹, azmifitrisia@fis.unp.ac.id²
ofianto.anto@gmail.com³

Abstrak

Filsafat merupakan usaha seseorang untuk mengetahui segala sesuatu yang berawal dari rasa ingin tahu dan sikap ragu. Rasa ingin tahu dan sikap ragu inilah yang kemudian memunculkan teori-teori ilmiah yang pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang dipelajari. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, sampailah pada pemikiran bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah alam yang realistis. Pengetahuan harus bersumber dari hal-hal faktual yang bersifat empiris. Aliran ini disebut dengan aliran filsafat positivisme. Praktek menyimpang dari etika administrasi masih sering terjadi. Banyak faktor yang menyebabkannya, di antaranya faktor eksternal, dan faktor internal, dari dalam diri seseorang. Hal-hal oleh aliran ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran aliran filsafat positivisme terhadap etika administrasi publik sebagai upaya mengatasi mal administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat positivisme memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan etika administrasi publik di zaman modern. Peran tersebut juga dirasakan oleh pemerintahan, misalnya perannya dalam perkembangan administrasi, pengambilan kebijakan dan jalannya pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: *Filsafat Positivesme, Etika Administrasi Publik*

Abstract

Philosophy is a person's attempt to know everything that starts from curiosity and doubt. It is this curiosity and doubt that then gives rise to scientific theories which will eventually develop into a learned science. Along with the development of human thought, came the idea that the only source of knowledge is realistic nature. Knowledge must be sourced from factual things that are empirical. This flow is called the flow of positivism philosophy. Practices that deviate from administrative ethics are still common. Many factors cause it, including external factors, and internal factors, from within a person. Things by this school are interesting for researchers to study further how the role of the flow of positivism philosophy on the ethics of public administration as an effort to overcome mal public administration. This research uses a qualitative approach with a literature study method. The results of the study indicate that the philosophy of positivism has a very large role in the development of public administration ethics in modern times. This role is also felt by the government, for example its role in the development of administration, policy making and good governance.

Keywords: *Filsafat Positivesme, Etika Administrasi Publik*

PENDAHULUAN

Filsafat dan ilmu adalah dua hal yang saling terkait. Lahirnya ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Begitu juga sebaliknya, keberadaan filsafat akan diperkuat dengan perkembangan ilmu. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola pikir dari mitosentris ke logosentris, yang awalnya percaya kepada dewa beralih kepada hal yang bersifat rasional (Muhammad, 2020). Artinya ada proses dalam oberpikir yang sangat mendalam dilakukan oleh manusia sehingga kepercayaan kepada dewa menjadi hal yang tidak perlu dipercayai lagi.

Perubahan pola pikir tersebut ternyata berimplikasi pada hal yang sangat besar yakni perubahan mitosentris ke logosentris ini menjadi awal ditemukannya hukum-hukum alam dan teori ilmiah. Sehingga bermuncullah berbagai macam cabang ilmu dari dua objek, yakni alam dan manusia. Objek alam akan menghasilkan ilmu astronomi, fisika, kimia dan lain sebagainya. Adapun objek manusia akan melahirkan ilmu biologi, sosiologi psikologi dan lain-lain.

Ilmu-ilmu yang lahir dari proses filsafat ini tentu tidak lepas dari cara, pemikiran dan konsep-konsep yang muncul ketika filsafat dijabarkan secara historis (Nasri, 2022). Dalam kacamata sejarah, filsafat telah berkembang menjadi beberapa macam aliran. Salah satunya ialah aliran positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah alam dan menyingkirkan hal yang berkenaan dengan metafisik. Sehingga data empiris sangat diutamakan oleh aliran ini dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

Melihat banyaknya sumber pengetahuan yang bisa didapatkan di masa sekarang melalui data empiris (pengalaman inderawi), maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas aliran filsafat positivisme dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta kontribusinya terhadap etika administrasi negara. Dari sini akan didapat bagaimana peran aliran tersebut bagi perjalanan etika administrasi public terkhusus di pemerintahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda pengumpulan data berupa studi literatur (*libray research*) dari berbarengan referensi yang relevan. Menurut Moleong (2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Segala data yang terkait dengan filsafat positivisme dan ilmu pengetahuan dikumpulkan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peranannya terhadap etika administrasi publik sehingga menghasilkan deskripsi sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Filsafat dengan Ilmu

Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu dan sikap ragu-ragu. Orang yang berfilsafat akan terdorong untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Dari sini sehingga muncul istilah bahwa filsafat merupakan sikap rendah hati yang mana orang yang berfilsafat merasa tidak tahu terhadap apa yang ada di alam. Ia akan terus mengoreksi diri seberapa jauh jangkauannya tentang apa yang tidak ia ketahui. Ia menganggap bahwa dirinya berada di puncak tinggi yang memandang lembah luas di bawahnya.

Rasa ingin tahu inilah yang kemudian memunculkan teori-teori ilmiah yang pada akhirnya nanti berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Menurut Ayi Sofyan (2010), teori-teori ilmiah sebagai hasil dari proses filsafat akan memunculkan dua macam ilmu, yakni ilmu yang berkaitan dengan alam dan ilmu yang berkaitan dengan manusia. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik antara ilmu dan filsafat. Filsafat merupakan 'ibu' yang melahirkan ilmu (*mother of sciences*) dari proses berpikirnya dan ia pun butuh akan peran dari ilmu tersebut

Di satu sisi filsafat merupakan pembuka sekaligus acuan yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu (Allesandro, 2014). Filsafat dapat merangsang lahirnya berbagai cabang ilmu. Adapun di sisi lain, banyak permasalahan dalam filsafat yang memerlukan landasan pengetahuan ilmiah. Ilmu dapat menyediakan sejumlah bahan berupa fakta-fakta untuk kepentingan pengembangan ide-ide filsafat sehingga sejalan dengan pengetahuan ilmiah.

Meskipun filsafat dan ilmu merupakan satu kesatuan dengan segala perannya terhadap yang lain, namun dalam perkembangannya antara ilmu dan filsafat mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat dalam mempengaruhi pemikiran manusia. Persamaan antara ilmu dan filsafat adalah bahwa kedua-duanya sama-sama terlahir dari pencarian dan perenungan yang disebabkan rasa cinta kepada kebenaran (Ricky, 2017). Kedua-duanya selalu berpikiran terbuka dan sangat kritis terhadap kebenaran. Adapun perbedaan antara ilmu dan filsafat ialah berkaitan dengan titik tekan. Di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, yang didapat dari hasil observasi dan eksperimen pengalaman indera. Sementara filsafat berupaya mengkaji

pengalaman secara menyeluruh dan menyangkut hal-hal universal dalam berbagai bidang pengalaman manusia.

2. Aliran Filsafat Positivisme

Positivisme berasal dari bahasa Inggris, yakni *positivism* atau *positivus* yang berarti meletakkan. Peletak dasar pemikiran positivisme ialah August Comte. Pemikiran Comte tentang positivisme ia tuangkan dalam karyanya dengan judul *The Course of Positive Philosophy*. Pemikiran Comte kemudian disebut dengan aliran filsafat positivisme yang mana aliran ini disebut sebagai aliran yang menekankan aspek *factual* pengetahuan. Aliran positivisme yang berkembang pada abad ini juga diartikan dengan aliran filsafat yang meyakini bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar sehingga studi filosofis atau metafisik akan ditolak dalam aliran ini (Piyanto, 2015).

August Comte yang dikutip oleh Karmillah mendefinisikan terminologi *positive* kepada lima hal, yaitu:

- a. Lawan dari suatu yang bersifat khayal. Sehingga positif diartikan sebagai sesuatu yang nyata. Objek yang menjadi sasaran haruslah didasarkan pada kemampuan akal.
- b. Sebagai lawan dari sesuatu yang tidak bermanfaat.
- c. Sebagai lawan dari sesuatu yang meragukan. Sebab, positivisme merupakan pengidentifikasian dari sesuatu yang bersifat pasti.
- d. Sebagai lawan dari sesuatu yang bersifat kabur. Pemikiran positivisme sangat menekankan kepada hal yang jelas dan tepat.
- e. Sebagai lawan dari sesuatu yang bersifat negatif. Karena pemikiran positivisme merupakan pemikiran yang dibuat dalam rangka penertiban cara berpikir ke arah yang lebih baik.

Kehadiran aliran filsafat positivisme merupakan respon dari ketidakmampuan filsafat spekulatif, seperti ajaran idealisme. Aliran filsafat ini sangat mendewakan ilmu dan metode ilmiah. Bahkan metode ilmiah telah dikembangkan oleh pemikiran positivisme sehingga wajah kebaruan dalam filsafat semakin terlihat. Menurut Comte, ada tiga tahap perkembangan manusia, puncak tertingginya ialah tahap positif. Tahapan tersebut berupa tahap teologis, tahap metafisik dan tahap teologis, tahap metafisik dan tahap positivistik. Tahap teologis merupakan tahap di mana manusia percaya bahwa ada kekuatan ilahi (dewa-dewi) di belakang gejala-gejala alam. Adapun tahap metafisik adalah tahap di mana pemikiran pada tahap teologis mulai mendapat kritik. Ide-ide abstrak yang telah dikembangkan oleh para filsuf Yunani sangat mewarnai tahap ini. Realitas pada tahap ini didasarkan pada pemikiran dan ide abstrak mereka. Adapun tahap positivistik ialah tahap di mana pemikiran manusia didasarkan pada pengalaman dan eksperimen. Artinya, manusia sudah memiliki sikap ilmiah dalam berpikir, inilah yang disebut dengan Hukum Tiga Tahap.

Tahap tertinggi yang dimiliki oleh manusia tersebut menggambarkan bahwa kebenaran adalah realistik yang ada dan bagaimana realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut berjalan. Realitas ini yang nantinya akan memunculkan sebuah metodologi ilmu-ilmu alam. Sehingga penekanan dari positivisme adalah tentang apa yang berdasarkan fakta objektif.

Pada tahap selanjutnya, aliran positivisme berkembang menjadi aliran neo-positivisme. Aliran ini merupakan gerakan yang berasal dari Wina. Kelompok yang beraliran neo-positivis ini kemudian disebut dengan Lingkaran Wina. Di bawah pimpinan Moritz Schlick, mereka yang terdiri dari Ernst Mach, Hans Hahn, Otto Neurath, Hans Reichenbach dan Rudolf Carnap mengembangkan tentang logika. Menurut mereka, corak empiris yang ditemukan oleh Comte tidak cukup bertolak pada pengalaman empiris saja, tetapi perlu ada logika yang harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Tetapi prinsip dasar yang digunakan oleh kelompok Wina tetap memiliki kesamaan dengan pemikiran August Comte.

3. Hubungan Ilmu dan Filsafat Positivisme

Sudah tidak diragukan lagi, jika pemikiran August Comte sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara hadirnya pemikiran positivisme dan perkembangan ilmu pengetahuan kala itu. Isu utama yang dibawa oleh kaum positivisme ialah tentang metodologi.

Metodologi diartikan dengan cara dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar tentang kenyataan. Kenyataan yang dimaksud ialah objek positif (*faktual*). Cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan ini menurut Comte dapat dilakukan melalui observasi dan eksperimen. Hadirnya metodologi observasi dan eksperimen tentu didasari pada argument bahwa satu-satunya sumber ilmu adalah alam yang hanya dapat dibuktikan

dengan data data empiris.

Dari pemikiran Comte tersebut, sangat wajar jika ia dianggap sebagai orang yang melahirkan sains modern di masa sekarang. Sebab, ada hubungan yang sangat erat antara sains dengan hadirnya filsafat. Filsafat sangatlah diperlukan dalam proses perkembangan sains. Secara Bahasa, sains berasal dari Bahasa latin "*scientia*" yang bermakna pengetahuan. Menurut istilah, sains diartikan dengan *general laws are considered to be the laws of nature that guide physical life, such as the laws of gravity, energy, and motion*. Sains adalah hukum umum yang berasal dari hukum alam yang dapat memberi pengaruh pada kehidupan fisik, seperti hukum gravitasi, energi dan gerak. Hukum-hukum yang diperoleh dari alam inilah yang nantinya akan menciptakan ilmu pengetahuan dan memberi bukti empiris. Menurut Colle dan Chiapetta yang dikutip oleh Istmah dan Wachid menyatakan bahwa sains dalam konteks filsafat adalah cara berpikir dalam upaya memahami alam yang didapatkan melalui proses penyelidikan.

Artinya ada kedekatan antara sains yang berkembang di masa sekarang dengan pemikiran positivisme yang dibawa oleh August Comte. Pada pembahasan selanjutnya, sains dalam pandangan Comte disusun dalam tingkatan yang universal menuju lingkup yang terbatas. Susunan tersebut meliputi matematika sebagai sains universal, astronomi, fisika, kimia, biologi dan sosiologi. Besarnya jasa positivisme terhadap perkembangan ilmu memang sudah tidak diragukan. Namun perlu cara dalam melihat konteks sejauh mana peran dari aliran filsafat positivisme.

Latar belakang lahirnya pemikiran Comte yang didasari dengan pemikiran positif ternyata muncul sebagai reaksi yang ditimbulkan karena trauma yang mendalam yang dialami masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ia menganggap bahwa keterbelakangan manusia disebabkan karena adanya belenggu dan ikut campur sebuah agama. Agama dituduh sebagai 'biang kerok' dari kehidupan yang terbelakang. Itulah mengapa tahap 'teologis' dalam Hukum Tiga Tahap ditempatkan pada tingkatan paling awal. Bahkan aliran ini disebut dengan aliran "anti teologi"

4. Pendekatan Etika Administrasi Publik

Terdapat beberapa pendekatan etika dalam menentukan baik dan buruk. Di antaranya adalah (Poedjawijatna, 139) sebagai berikut.

Pertama, aliran sosialisme. Menurut aliran ini, baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik, dan orang yang menentang dan tidak mengikuti adat istiadat dipandang buruk, dan kalau perlu dihukum secara adat.

Kedua, aliran *hedonisme* (*hedone* adalah perasaan akan kesenangan). Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan atau rasa puas kepada manusia. Menurut paham ini, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua perbuatan mengandung kelezatan melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan. Apabila ia disuruh memilih terkait manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah mendatangkan kelezatan.

Ketiga, aliran *intuisisme*. Paham ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan naluri batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya, karena pengaruh masa dan lingkungan, akan tetapi ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Apabila ia melihat sesuatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang dapat memberi tahu nilai perbuatan itu, lalu menetapkan hukum baik dan buruknya.

Keempat, aliran utilitarianisme. Secara harfiah, *utilis* berarti berguna. Perbuatan yang dianggap baik secara susila ialah "guna atau manfaat". Penganut utamanya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham mengatakan bahwa *the greatest happiness of the greatest number*. Menurut paham ini, bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan, disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Sempalan dari ajaran ini antara lain adalah aliran pragmatisme, empirisme, positivisme, dan neo-positivisme (*scientism*).

Kelima, aliran vitalisme. Menurut paham ini yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang, dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang itulah yang baik.

Keenam, aliran religiusisme. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam paham ini, keyakinan teologis, yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peranan penting, karena tidak mungkin orang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, jika yang bersangkutan tidak beriman kepada-Nya.

Ketujuh, aliran evolusisme. Mereka yang mengikuti paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaannya. Pendapat seperti ini bukan hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, seperti binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga benda yang tak dapat dilihat atau diraba oleh indera, seperti akhlak dan moral.

5. Nilai Nilai Etika Administrasi Publik

Terdapat seperangkat nilai dalam etika administrasi public yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Widodo (2001) menguraikannya sebagai berikut.

Pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik (administrasi publik) dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros) Artinya menurut Darwin (1995: 198) mereka akan menggunakan dana publik (*public resources*) secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. *Resources* public tidak boleh dibelanjakan secara boros, tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas, atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. Dengan demikian, nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Efisiensi dapat dicapai manakala setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi kepada organisasi. Karenanya perlu ditegakkan suatu prinsip jangan bertanya apa yang bisa didapatkan dari organisasi, tapi bertanyalah apa yang dapat diberikan kepada organisasi.

Kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik (milik kantor) hanya betul-betul untuk kepentingan kantor. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan menjalankan dinas, dan bukan untuk mengantar anaknya ke sekolah dan istrinya ke pasar. Uang kantor tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya.

Ketiga, nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan yang lain dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal (impersonal) dan tidak pribadi (personal). Hubungan impersonal ini perlu ditegakkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan dari pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi. Sebagai gambaran, dalam suatu organisasi ada seorang pimpinan (bapak), kemudian ada staf, bawahan, atau pelaksana adalah masih ada hubungan kekerabatan (anak, keponakan, famili, alumni, dan sejenis). Ketika staf tadi berbuat salah, jika mereka menggunakan pendekatan personal, maka unsur perasaan mereka yang akan berbicara dari pada unsur rasio untuk mengambil suatu tindakan hukuman (*punishment*) terhadap staf yang berbuat salah tadi. Namun manakala menggunakan pendekatan impersonal, maka siapa-pun yang salah harus diberikan tindakan hukuman (*punish-ment*). Siapapun yang berprestasi selayaknya mendapatkan imbalan (*rewards*) kepada orang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ditegakkan dalam organisasi tersebut.

Keempat, nilai *merytal system*. Nilai *merytal system*, berkaitan dengan penerimaan (*recrutment*) atau promosi (*promotion*), hendaknya dilakukan dengan menggunakan "*meryt system*", dan bukan "*spoil system*". *Merytal system* merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial (anak, keponakan, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain), akan tetapi didasarkan pada pengetahuan (*knowlegde*), ketrampilan (*skill*), kemampuan (*capable*) dan pengalaman (*experience*) yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan *spoil system* merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial (anak, keponakan, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain), dan bukan didasarkan pada pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), kemampuan (*capable*) dan pengalaman (*experience*) yang dimiliki oleh orang yang

bersangkutan. *Merytal system* ini akan menjadikan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha kerjasama tadi menjadi cakap dan profesional (*professional and capable*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kelima, nilai responsibel. Nilai responsibel (*responsible*) berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Responsibilitas (*responsibility*) menurut Friedrich dalam Darwin (1996: 190) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional.

6. Peran Filsafat Positivisme Terhadap Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Mengatasi Mal Administrasi

Penyalahgunaan wewenang (*mal-administrasi*) yang sering dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan tugasnya berupa KKN dengan segala bentuknya seperti ketidakjujuran, perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar peraturan perundang-undangan, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, inefisiensi atau pemborosan, menutupi kesalahan dan kegagalan mengambil prakarsa (Flippo, 1983). Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan etika administrasi publik secara baik dan konsisten. Dengan diwujudkannya etika administrasi publik yang baik dan memiliki budaya organisasi serta manajemen yang baik diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula. Nilai etika administrasi publik yang dimaksud antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor impersonal, *merytal system*, *responsible*, *accountable*, dan *responsiveness* (Widodo, 2001).

Selain itu pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan kode etik yang khusus mengatur tentang administrasi publik sebagaimana telah diterapkan di negara Amerika Serikat, dengan kode etik administrasi public. Kode etik yang dimiliki ASPA (*America Society for Public Administration*) pada tahun 1989, antara lain: *pertama*, pelayanan kepada masyarakat berada di atas pelayanan kepada diri sendiri; *kedua*, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat; *ketiga*, hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah, apabila hukum dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana, atau perlu perubahan, maka akan mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan.

Keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik; *kelima*, sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama dan asas-asas iktikad baik akan didukung, dijalankan dan dikembangkan; *keenam*, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting; *ketujuh*, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi dan kasih sayang; *kedelapan*, hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan; *kesembilan*, para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan yang benar melalui pelaksanaan tanggung-jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya (Kumorotumo, 1992).

Etika dan kode etik administrasi publik tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan fungsi etika administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh Widodo (2001) yaitu: *pertama*, sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; *kedua*, etika administrasi publik (etika birokrasi) sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik.

Jika nilai-nilai etika administrasi publik sebagaimana digambarkan di atas sudah menjadi suatu norma yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka akan dapat mencegah timbulnya *mal-administrasi* seperti KKN dalam berbagai bentuknya, meskipun tidak ada lembaga pengawasan. Namun hal tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadinya *mal-administrasi* dalam tubuh birokrasi. Terdapat hal yang lebih penting yaitu kontrol internal dari penyelenggara administrasi publik, dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri seseorang. Jika mereka meyakini bahwa perbuatan KKN tersebut dilarang oleh agama dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT, maka mereka tidak akan melakukannya sekalipun kesempatan itu ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skala prioritas untuk mencegah terjadinya *mal-administrasi* publik seperti KKN adalah: *pertama*, perlu adanya kontrol internal yang kuat pada diri penyelenggara

administrasi publik, yang dapat membentuk kepribadian yang dilandasi nilai keimanan dan keagamaan; *kedua*, adalah mengimplementasikan etika administrasi publik; *ketiga*, adanya kontrol eksternal dalam wujud adanya pengawasan, baik pengawasan politik, fungsional maupun pengawasan masyarakat. Namun akan jauh lebih efektif jika ketiganya dapat diberlakukan secara bersamaan. Dengan demikian maka *mal-administrasi* seperti KKN dan segala dimensinya bukan hanya dapat dicegah tapi juga dapat diberantas.

Selain hal di atas, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi *mal-administrasi* publik (Steinberg dan, Ibrahim, (2008) di antaranya sebagai berikut

- a. Mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance*
- b. Laporan kekayaan penyelenggara negara (diumumkan di lembaran negara, diaudit, ditindaklanjuti, dilihat kelayakannya sebelum, sewaktu, sesudah menjabat, dan ditindak dengan sanksi yang sesuai)
- c. Adanya hukum, undang-undang, kode etik yang meliputi antara lain: 1) Undang-Undang pemberantasan bentrokan kepentingan yang bersifat kriminal, yang melarang tindakan yang dapat dikenai hukuman kejahatan secara rinci; 2) Undang-Undang yang cakupannya lebih luas mengenai bentrokan kepentingan (standar perilaku yang dilanggar, sehingga ada ketentuan tindakan administratif, teguran, pemecatan, dan lain-lain; 3) keberanian “meniup peluit”; 4) pembatasan pasca ikatan kerja dan perilaku yang tidak/kurang etis; 5) standar hukum/kompetensi perilaku etis bagi pejabat hasil pemilihan; 6) perlunya kode etik penyelenggara negara dan *stake holders* lainnya dalam berbagai segmennya (kode etik bagi supra dan infra struktur politik bila yang terakhir mungkin diatur)
- d. Diwujudkan dengan baik etika administrasi publik yang memiliki budaya organisasi dan manajemen yang baik yang meliputi pelatihan, pengauditan, penyelidikan dan pengendalian manajemen publik

SIMPULAN

Aliran filsafat positivisme merupakan aliran yang digagas oleh August Comte. Aliran ini berpandangan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah alam yang realistik. Sehingga aliran ini sangat mengutamakan metode ilmiah dan aspek faktual pengetahuan. Tahapan positif dianggap sebagai tahap tertinggi yang mampu dicapai oleh manusia. Dari paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa penyimpangan terhadap *mal-administrasi* seperti KKN dengan segala skala dan dimensi yang seringkali terjadi saat ini banyak sekali yang disoroti publik. Hal demikian dapat menggeroti rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu mengimplementasikan etika dalam administrasi publik menjadi suatu keharusan bagi setiap administrator publik. Karena etika berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sekaligus sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan diwujudkan etika administrasi publik yang baik yang memiliki budaya organisasi dan manajemen yang baik diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ibrahim. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Darwin, Muhajir. 1995. *Dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edwin, Flippo. 1983. *Administrative Responsibility* dalam Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro, *Modern Public Administration*, terjemahan DS. Widodo. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginjar, Kartasmita. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Joko, Widodo. 2001. *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Poedjawijatna. 1986. *Etika: Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Bina Aksara

- Ryaas, Rasyid. 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta; LP3ES. Suyamto, 1989. *Norma Dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Kumorotomo. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Helmi, Muhammad, and Sovia Rahmaniah. "Pandangan Filosofis Dan Teologis Tentang Hakikat Ilmu Pengetahuan Sebagai Landasan Pendidikan Islam." *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2020): 38.
- Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Belukar, 2004. Nugraha, Rizky. *Filsafat Ilmu*. Jambi: Pustaka Ma'arif Press, 2017.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nasri, E., Setiawan, T. H., Warianto, H., Aden, A., & Ilmadi, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Prestasi Belajar Ujian Matematika Siswa Dengan Menggunakan Metode Analisis Faktor. *Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(1), 12–28. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i1.64>
- Pinangkaan, Allesandro. "Realita Hubungan Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis," 2014.